

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Disharmonisasi antara partai politik di Sumatera Barat banyak terjadi ketika perhelatan Pemilihan Presiden usai dan Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan Pemerintahan. Meskipun itu skala nasional, akan tetapi berdampak besar ke daerah, terutama di Sumatera Barat. Partai Gerindra dan PKS menjadi partai yang awalnya harmonis dan seiring berjalannya waktu mulai terjadi disharmonisasi antara kedua partai tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan banyak terjadi konflik-konflik politik yang melibatkan kedua partai tersebut. Dalam berbagai kesempatan, mulai dari tahun 2019 hingga saat ini Partai Gerindra dan PKS selalu berbeda pendapat bahkan tak jarang berbeda keputusan di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan teori konflik dari Dahrenrof, konflik terbagi atas 3 yaitu Kelompok Semu, Kelompok Kepentingan dan Kelompok Konflik. Dalam menjelaskan kelompok Semu, dahrenrof berpendapat bahwa kelompok semu menurutnya merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan.

Hal ini pun terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dimana Partai Gerindra pada AKD 2019-2022 adalah kumpulan dari para pemegang kekuasaan serta memiliki kepentingan yang sama. Sehingga pada tahun 2019, F-Gerindra melayangkan Hak Interplasi kepada Gubernur Irwan Prayitno atas perjalanan dinas

yang berlebihan. Ini menjadi bentuk mula bagaimana Gerindra memaksimalkan gerakan dari Kelompok Semunya. PKS Sendir tidak mempunyai kekuatan yang signifikan dikarenakan hanya mempunyai 2 Kader yang berada di pusara AKD 2019-2022.

Hal ini menjadi awal konflik pasca Pemilu dan Presiden 2019 di Sumatera Barat sendiri. Tidak hanya sampai disana, konflik pun terjadi atas kepentingan yang terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat itu sendiri. Yang dimana Terjadi Hak Angket kepada H. Mahyeldi Ansharullah atas landasan permintaan sumbangan untuk buku Sumatera Barat Madani. Ini menjadi titik kedua dimana kedua partai ini berkonflik di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kembali secara tidak langsung, Gerindra dan PKS berdinamika konflik yang dimana muncul kelompok kepentingan yang mulai memihak kepada Gerindra. Meskipun hak angket bukan Gerindra yang mendukung, akan tetapi dengan 14 kursi DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Gerindra ditambah dengan Demokrat sebagai inisiator 10 Kursi serta beberapa kursi tambahan dari Fraksi Gabungan yang mencapai 33 Kursi membuat Hak Angket harus digulirkan. Yang dimana hasilnya, hak angket tersebut berhenti di tengah jalan akibat 2 kursi dari fraksi lain memutuskan untuk tidak melanjutkan hak angket. Sementara hak angket dapat dilakukan jika sudah mencapai 50%+1. PKS sendiri merasa bahwa Partai Gerindra mulai menyerang mereka secara terbuka sehingga timbullah bibit-bibit konflik baru.

Yang terakhir dengan Kelompok Konflik yang dimana dijelaskan oleh dahrenrof adalah bercampurnya kelompok semu dan kepentingan. Ini terjadi ketika

Rotasi AKD 2022-2024 yang dimana F-Gerindra meminta Komisi IV Sepenuhnya berasal dari Gerindra, Namun sayang hal ini justru merugikan Gerindra. PKS sebagai partai yang tidak mempunyai posisi strategis akhirnya mendapatkan AKD 2022-2024, sementara Gerindra hanya mendapatkan jabatan anggota saja.

Disimpulkan bahwa, Koalisi yang dibangun di pusat tidak berjalan baik hingga ke daerah. Bagaimana tidak Partai Gerindra sebagai partai pemenang di Pemilu 2019 dengan 14 kursi seakan seperti momok bagi PKS yang hanya mempunyai 10 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya Hak angket, hak interplasi membuktikan bahwa Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekuatan politik yang membuat Fraksi PKS disana cukup terdesak. Namun, hal ini sendiri menjadi momok bagi Fraksi Gerindra sendiri. Dengan banyaknya kader gerindra di AKD 2019-2022 awal, tentunya membuat Gerindra secara tidak langsung menguasai ranah DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pasca rotasi AKD 2022-2024, Fraksi Gerindra seakan kehilangan kekuatan politiknya yang dimana tidak ada kader terbaik mereka yang menempati posisi penting di AKD rotasi 2022-2024 dan disitulah momentum PKS mengunci kekuatan mereka kembali. Dengan konflik yang berjalan selama 5 tahun, membuktikan bahwa disharmonisasi antara 2 partai ini terjadi di DPRD Provinsi Sumatera Barat itu sendiri.

6.2 Saran

2.1.1 Saran Teoritik

Kajian tentang *konflik politik* yang hadir dari *disharmonisasi* partai politik sendiri merupakan fenomena yang sering terjadi. Ini terjadi akibat deal-dealan

koalisi yang terjadi di pusat tidak berjalan hingga ke daerah. Bahkan tak jarang, ditengah jalan koalisi di pusat tersebut bubar. Ini yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat antara Partai Gerindra dengan PKS.

Konflik politik terjadi antara Partai Gerindra dan PKS tentunya adalah salah satu hal yang menarik diteliti lebih dalam oleh peneliti selanjutnya. 2 kekuatan politik di Sumatera Barat sering “bertolak” baik di eksekutif maupun legislatif. Disharmonisasi yang terjadi antara 2 partai ini sendiri akan berpengaruh dengan keputusan-keputusan politik yang akan terjadi di Sumatera Barat kedepannya. Bagaimana konflik politik baik secara kepentingan, kelompok maupun kelompok konflik bukan sekedar atas check and balance secara legislatif saja. Namun juga kepentingan partai masing-masing.

2.1.2 Saran Teknis

Selbagai saran bagi partai untuk mempertahankan koalisi yang mereka bangun di pusat hingga ke daerah. Meskipun terjadi dinamika politik di pusat, bukan berarti akan berdampak ke daerah hingga ke legislatifnya. Dengan adanya harmonisasi antara partai-partai yang berkoalisi ke pusat hingga ke daerah bukan tidak mungkin stabilitas politik akan terjaga baik di eksekutif, hingga legislatif kedepannya. Untuk masyarakat, ini menjadi bahan kajian politik yang mendalam bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara partai-partai di DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat menyebabkan disharmonisasi antara partai-partai tersebut hingga konflik yang mengakar.